BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini dalam pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap Negara. Salah satu tolak ukur yang di gunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli).[1]

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatkannya nilai IPM menunjukan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini

[11] Denni sulistio Mirz, "*Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah* "jurnal Ekonomi Pembangunan , h. 102.

mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting.[2]

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang hal yang wajar terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan[3] Untuk melihat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *united Nation development programe* (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia IPM sebagai tolak ukur angka suatu kesejantraan daerah atau Negara yang dilihat berdasarkan beberapa dimensi yaitu : angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birt)*, angka melek huruf (*lite cary rate)* dan

[2] Muliza, T. Zulham, chenny seftarita "*Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh*" Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 1 , Maret 2017, 52.

[3] Michael P.Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksari 1994), 138

rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling)* serta kemampuan daya beli *(purchasing power parity).*

Pada angka harapan hidup menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, harapan lama sekolah menurut kabupaten/kota di provinsi Banten pada tahun 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pada rata-rata lama sekolah menurut kabupaten/kota di provinsi Banten mengalamin tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan pada tahun 2014-2015.

Dari ketiga Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat mempengaruhi oleh faktor- faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meninggkat apabila ketiga unsur tersebur dapat ditingkatkan dan

nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. [4]

Dengan indikator tersebut diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia karena adanya keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dengan campur tangan dan kinerja pemerintah yang berperan dalam terciptanya kualitas hidup penduduknya karena pembangunan manusia merupakan salah satu aspek kemajuan suatu Negara. Indonesia mengalami permasalahan yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia.

Rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human development index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai indeks pembangunan manusia yang di keluarkan oleh *united Nations De*velopment program (UNDP). Pembangunan manusia yaitu salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara

[4] Devianti patta "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010"* (Skripsi : Universitas Hasanudin, 2011), 2-3.

pembangunan suatu Negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto suatu negara tak diimbangi dengan tingkat pembangunan manusia yang sejalan hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahtraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusia yang tinggi , pemerintah menggunakan APBD-nya untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor tersebut secara spesifik, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui belanja pembangunan di sektor–sektor pendukung untuk meningkat kan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi[5].

Mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, sebeb segala aktivitas pemerintahan daerah hampir dapat dipastikan terkait dengan pengelolaan pemerintah dan pengelolaan pemerintah dan pengeluaran dana (kas) yang nota bene tersaji dalam anggaran pendapatan dan belanja (serta

[5] Sunarni, "*Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten / Kota SE-INDONESIA"* (Tesis : universitas Lampung, 2017) hal. 2

pembiayaan) daerah, yang lebih di kenal dengan APBD. Kegiatan pengelolaan APBD di maksud meliputi kegiatan perencanan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD pendapatan, belanja, dan pembiayaan[6]

Saat ini banyak daerah yang berlomba-lomba untuk meningkat kan pembangunan daerahnya sendiri, karena salah satu faktor pendukung kesejahtraan daerah adalah dengan tersedianya infrastuktur yang memadai. Namun faktanya seperti yang di lansir dalam wartaekonomi.co.id, masih banyak pemerintah daerah (pemda) lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor sektor yang kurang di perlukan dan lebih banyak di gunakan untuk belanja rutin, sebab 100% belanja rata-rata hanya 20% yang di gunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk investasi untuk meningkatkan pelayanan publik[7]

[7] Novia NurputriAsni, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Belanja Pemeliharaan (Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon*, skripsi pada Universitas Komputer Indonesia, *h. 2.*

PP Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBN. Belanja modal di realisasikan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah. Komponen belanja modal terdiri dari belanja tanah, gedung, dan bangunan peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya[8]

Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastuktuk, dan harta tetap lainnya. Pemerinta daerah bertambah nilainya dari tahun ke tahun, sehingga dapat di katakana aset tetap pemerintah

[8] Etik umiyati, Amril, zulfanetti, *Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten /Provinsi Jambi,* Jurnal Sains Sosiohumaniora

daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *outcome/output* dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahun anggarannya[9]

Rata-rata perkembangan belanja modal di provinsi Banten selama periode 2011- 2015 mengalami peningkatan sebesar 5% belanja daerah terbesar pada tahun 2015 yaitu sebesar 9.236.214.977.000 triliun rupiah. Alokasi belanja daerah yang terkecil yaitu kota serang sebesar 751.332.443.000 triliun rupiah. selanjutnya lokasi jumlah terbesar selanjutnya alokasi terbesar belanja daerah terbesar yauitu provinsi banten.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah pendapatan Asli daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Apabila melihat keberadaan PAD kabupaten/kota di provinsi Banten yang masih belum merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, hal tersebut

[9] Novia Nur Putriasni, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Implikainya Pada Belanja Pemeliharaan* (studi pada pemerintah kota Cirebon), h.1.

disebabkan karena PAD yang tinggi selama ini diperoleh oleh kabupaten/kota yang potensi daerahnya sangat besar di domisili oleh adanya tempat pariwisata. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi upaya pemerintah daerah dalam menuingkatkan kualitas layanan publik dan menimalisi terjadinya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggran daerah.[10]

Perkembangan pendapatan asli daerah provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahunnya pada periode 2011-2015, PAD tertinggi tedapat pada tahun 2015 sebesar 4.972.737.619.000 dan terendah pada tahun 2011 sebesar 41.890.335000 PAD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut pemerintah daerah di harapkan lebih mampu mengenali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang

[10] Made pradana adiputra, dkk, *Pengaruh PAD Dana Perimbangan Dan SILPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variable Inter Vening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Bali)* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.

“ **PENGARUH JUMLAH BELANJA DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN PADA TAHUN 2011 SAMPAI 2015 ”**

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya fliktuasi pada realisasi belanja daerah pemerintah provinsi Banten dalam dua tahun terakhir namun fluktuasi ini diikuti dengan penurunan pembiayaan yang mana angka terendah realisasi belanja daerah terjadi pada 2011.
2. Terjadinya fluktuatif pada PAD provinsi Banten dalam dua tahun terakhir namun fluktuasi ini di ikuti dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2015.
3. Pembiayaan IPM yang selalu meningkat pada provinsi Banten setiap tahunnya namun pada sektor pendidikan di kota tangerang mengalami stagnan pada tahun 2014-2015

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan rumusan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah belanja daerah pemerintah, terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Banten tahun 2011-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2011-2015 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah Belanja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2011-2015 ?
4. Bagaimana pandangan teori Ekonomi Islam mengenai Indeks Pembangunan Manusia ?

D. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang aka di laksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia realisasi belanja modal PAD di provinsi Banten tahun 2011-2015.

2. Pengaruh realisasi belanja daerah pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tujuan bertujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah belanja terhadap Indek Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2011-2015
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2011-2015
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Belanja, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten tahun 2011-2015.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah di rumuskan, kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif, kualitatif, atau bahkan gabungan pada keduanya.

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikir yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti.[11]

Salah satu masalah penting yang dihadapai dalam pembangunan suatu daerah adalah rendahnya pembangunan mansusia dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena pembangunan manusia merupakan salah satu indikator suatu bangsa itu sendiri, pencapaian pembangunan manusia dilihat dari tiga indikator yaitu:

1. Kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup

[11] Mohamad Pidik dan priadana Salaudin Muis, *Metodologi Penelituan Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009) cet. h.89.

2. Pendidikan yang diukur dengan persentse melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama sekolah
3. Daya beli yang diukur dengan pendapatan perkapita

Indeks pembangunan manusia dipengaruhi atas beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembangunan manusia seperti belanja modal pemerintah, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan lain-lain.

Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja pemerintah dalam pelayanan pablik pada hakikatnya pembangunan adalah pembangunan manusia sehingga perlu di prioritaskan alokasi belanja dalam penyusunan anggaran agar dapaat memacu peningkatan kesejahtraan masyarakat di daerah. pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangun menjadi suatu kebutuhan karna kualitas manusia di suatu wilayah

memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

Dengan tinggi Pendapatan asli daerah akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut pendapatan asli daerah di alokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pendidikan dan perekonomian yang di harapka dapat meningkatkan kualitas manusia di daerah tersebut

Gambar 1.1

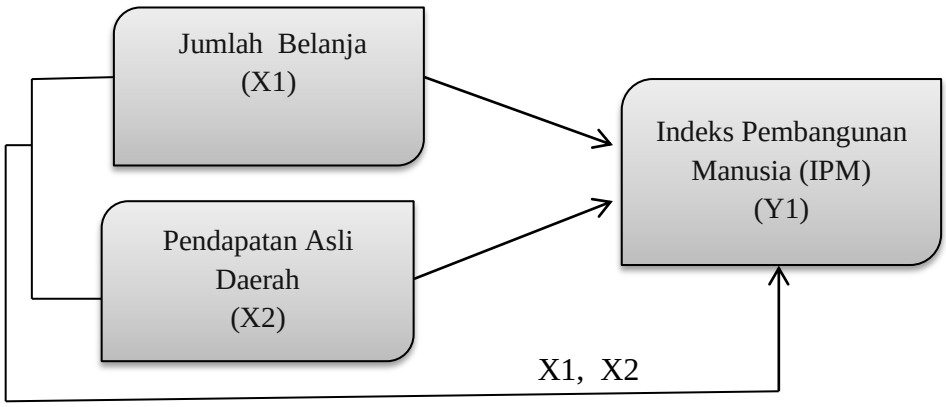

Dari gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian pengaruh jumlah Belanja, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena keberhasilan pembangunan sumber daya manusia ada hubungannya dengan campur tangan dan kinerja pemerintah yang

berperan dalam terciptanya kualitas hidup penduduk karena pembangunan manusia merupakan salah satu aspek kemajuan suatu Negara.

G. Sistematika Penulisan

Penetitian ini di susun dengan sistematika penulisan Bab I pendahuluan, Bab II Tinjauan pustaka, Bab III Metode penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan Bab V Kesimpulan dan saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di jelaskan mengenai latar belakang dan studi ini yang selanjutnya di rumuska permasalahan penelitian yang berupa pertanyann kajian. Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori- teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian- penelitian terdahulu, maka

akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang aka diuji

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variable-variable yang akan digunakan dalam penelitian serta definisi oprasionalnya, jenis dan sumber data metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai hasil analisis dari objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.